

Peran IBI dalam Implementasi Kebijakan PP RI No.33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kota Bengkulu

Lela Hartini

Poltekkes Kemenkes Bengkulu
Email: lela_hartini@yahoo.com

Artikel history

Dikirim, Des 30th, 2018

Ditinjau, Jan 29th, 2019

Diterima, Feb 28th, 2019

ABSTRACT

An indicator of increasing degree of health marked by declining infant mortality (AKB). The risk of AKB could be reduced by as much as 22% with exclusive breast feeding. IBI as the only organization that embraces a midwife in the profession of midwifery and support government program. The purpose of this research is to know the performance of the role Ikatan Bidan Indonesia (IBI) administrators in the implementation of the policies of the PP RI No. 33 2012 about giving breast milk in Bengkulu. Methode of this research is qualitative descriptive observational design by indepth interview on 3 persons Caretaker IBI, Triangulasi with Chairman IBI Province, Kasie Nutrition health services and a member of region parlement. The results are the role of the IBI performance as implementers include motivating, evaluating and coaching to members in the implementation of the policies has still not acted properly. The role of caretaker manager in developing service of midwifery are still lacking regulatory cooperation with the health services as well as related government agencies. While the role of decision makers, educators and health extension officers also did not exist. Suggested for IBI to increase the motivation, coaching and supervision to the midwife, give a reword or formal sanction to Independent Practice midwives

Keywords : *Role Of IBI; Implementation; Exclusive breast milk*

ABSTRAK

Indikator meningkatnya derajat kesehatan ditandai dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB). Risiko kematian bayi (AKB) bisa berkurang sebanyak 22% dengan pemberian ASI eksklusif. PP No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan IBI sebagai satu-satunya organisasi profesi yang menaungi bidan dalam profesi kebidanan dan mendukung program pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja peran pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam Implementasi Kebijakan PP RI No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kota Bengkulu. Rancangan penelitian ini adalah penelitian observasional

deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada 3 orang Pengurus IBI, Trigulasi dengan Ketua IBI Provinsi, Kasie Gizi dinas kesehatan kota serta anggota DPRD. Hasil penelitian peran kinerja pengurus IBI sebagai pelaksana yang meliputi memotivasi, mengevaluasi dan pembinaan kepada anggota dalam Implementasi Kebijakan PP RI No. 33 Tahun 2012 masih belum berperan dengan baik. Peran pengurus IBI sebagai pengelola dalam mengembangkan pelayanan kebidanan juga masih kurang kerjasama secara regulasi dengan dinas kesehatan maupun instansi pemerintah yang terkait. Sedangkan Peran kinerja pengurus IBI sebagai pembuat keputusan, pendidik serta penyuluh kesehatan juga belum ada secara tertulis. Disarankan bagi organisasi IBI Meningkatkan motivasi, pembinaan dan pengawasan kepada bidan, memberikan reward maupun sanksi secara formal kepada Bidan Praktek Mandiri.

Kata Kunci : Peran IBI; Implementasi; ASI Eksklusif

PENDAHULUAN

Indikator meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB). AKB di Provinsi Bengkulu tahun 2008 sebanyak 7,3 per 1000 kelahiran hidup Penyebab utama kematian bayi adalah infeksi saluran pernapasan akut, diare dan komplikasi kelahiran. Tetapi penyebab dasar dari 54% kematian bayi di Indonesia adalah gizi kurang yang berdampak pada penurunan daya tahan tubuh (Roesli 2005; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2018)

Menyusui dan ASI Eksklusif merupakan persoalan mendasar dan bernilai sangat strategis sehingga perlu diatur sampai dengan tingkat Peraturan Pemerintah (PP). Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang ASI sampai

menjadi Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif setidaknya dibutuhkan waktu paling tidak sekitar lima tahun untuk menggolkan regulasi tersebut. PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif telah diundangkan sekaligus mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2012. PP ini terdiri dari 10 bab, 43 pasal dengan total 55 ayat, dan mengatur 7 hal pokok, yaitu 1) tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; 2) Air Susu Ibu; 3) penggunaan susu formula dan produk bayi lainnya; 4) tempat kerja dan tempat sarana umum; 5) dukungan masyarakat; 6) pendanaan; dan 7) pembinaan dan pengawasan (Simarmata 2016; Fikawati & Syafiq 2010).

Walaupun regulasi dan program telah ditetapkan oleh pemerintah namun cakupan

pemberian ASI eksklusif masih belum mencapai target nasional sebesar 80%. (Dewi et al. 2016). Salah satu organisasi profesi yang berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam pencapaian program Peningkatan Pemberian ASI adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI). IBI sebagai satu-satunya organisasi profesi yang menaungi bidan di seluruh Indonesia memiliki tujuan untuk membina dan mengayomi anggota serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terutama dalam profesi kebidanan dan mendukung program pemerintah untuk berperan serta dalam pembangunan, melalui pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak (IBI, 2008; Helda 2009)

METODE

Subjek penelitian diambil secara *purposive* untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian atau informan utama dalam penelitian ini adalah Pengurus Ikatan Bidan Indonesia Kota Bengkulu (Ketua IBI Kota, Ketua Ranting dan Pengurus IBI), Triagulasi yang terdiri dari Ketua IBI Provinsi Bengkulu, Kasie Gizi dinas kesehatan Kota dan Komisi I. Serta dilakukan FGD Pada Praktik Mandiri Bidan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan deskriptif kualitatif melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan Trigulasi dan FGD dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan variabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pengurus IBI yang dilakukan dengan cara *indept interview* sebagai pelaksana dalam memberikan motivasi, mengevaluasi maupun melakukan pembinaan pada anggota organisasi tentang PP No. 33 tahun 2012 hampir seluruh informan mengatakan masih kurang, hal ini dapat dilihat dari pernyataan ini:

Informan Utama
<p>Kotak 1</p> <p>“Kalau dari organisasi masih kurang motifasi yang dilakukan secara tertulis, paling juga ngomong waktu seminar ajo” (informan A1)</p> <p>“Kalau kami dari pengurus ranting paling hanya mengingatkan bidan tentang aturan pemerintah terutama tentang ASI Eksklusif” (Informan A 2)</p> <p>“Kita hanya sekedar mengingatkan teman-teman BPM kalau bayi harus diberi ASI eksklusif paling itulah, kalau tertulis dan terjadwal nian belum ado ”(Informan A 3)</p>

Berdasarkan kotak 1 di atas peran pengurus IBI sebagai pelaksana dalam memberikan motivasi secara langsung pada PMB dan melakukan evaluasi serta pembinaan kepada PMB masih kurang hal ini juga sejalan dengan hasil triangulasi pada Kasie gizi yang menyatakan :

*“Kalau kita dari gizi bisa melihat dari laporan bidan yang setiap bulan mereka serahkan jadi kita bisa melihat berapa cakupan ASI eksklusif tapi kalau pengawasan secara langsung kita dari dinas kesehatan belum pernah melakukan , paling juga waktu kegiatan posyandu, tapi itu juga hanya pelaksanaan monitoring tidak secara langsung.”
(Informan B1)*

Sedangkan hasil triangulasi menurut informan B2 mengatakan :

“Kita bisa melihat dari buku KIA yang sudah dibuat oleh bidan. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahi hanya dari bidannya saja, karena dalam peningkatan cakupan ASI ini memang sangat dibutuhkan kerjasama dari berbagai lintas sektor termasuk suami dan keluarga. Karena terkadang meskipun kita sudah memberikan penyuluhan pada Ibu nya tapi begitu sampai dirumah sang bayi diberikan madu, dan air putih atau dll, nah kalau bayi sudah diberikan minuman lain selain ASI kan berarti sang bayi tidak asi eksklusif lagi” (Informan B2)

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hampir seluruh responden mengatakan masih kurang mendapat motivasi secara langsung dari organisasi IBI tentang PP No. 33 tahun 2012 . Seharusnya dalam peran sebagai pelaksana organisasi bisa memberikan motivasi secara langsung ke BPM sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif. Tindakan memotivasi ini dapat dilakukan dengan memberikan dan membangkitkan inspirasi diri seseorang sehingga orang tersebut tergerak untuk melakukan sesuatu yang menjadi tugasnya (Wibowo, 2010).

Sedangkan menurut ketua ranting pernah diberikan motivasi kepada bidan sebagai anggota organisasi melalui arisan bulanan yang dilakukan oleh organisasi IBI. Kondisi ini sesuai dengan teori motivasi Herzberg, bahwa yang dapat membangkitkan semangat kerja seseorang disebut motivator yaitu diantaranya adalah rasa tanggung jawab. Meningkatkan motivasi seseorang dengan membangun tanggung jawab mampu membuat orang tersebut bekerja secara baik sehingga memunculkan kepuasan kerja (Thoah, 2009). Pemimpin harus mampu untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab

total terhadap usaha mencapai atau melampaui tujuan organisasi (Robbins, 2007). Pemberian motivasi juga bisa dilakukan pemimpin dengan menggunakan teknik yang dapat mempengaruhi dan menarik emosi atau logika untuk menimbulkan semangat terhadap tugas yang menjadi tanggung jawab (Yukl 2005).

Berdasarkan hasil penelitian ini juga belum dilakukan evaluasi dari pengurus IBI terhadap pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif. Menurut Keitner dan Kinicki evaluasi dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi kinerja individu dalam organisasi dan mengevaluasi pencapaian tujuan. Tidak adanya kegiatan evaluasi menyebabkan tidak terkumpulnya informasi yang memadai tentang sejauhmana program sudah dijalankan dan apakah terjadi penyimpangan atau tidak dalam pelaksanaannya. Evaluasi juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau permasalahan yang ada dalam organisasi (Dharma 2005; Kusumaningrum 2018) Pada hasil wawancara dengan triangulasi mengatakan kalau evaluasi yang ada hanya sebatas melihat laporan cakupan pemberian ASI eksklusif yang diberikan oleh bidan praktik mandiri.

Ditinjau dari sudut administrasi, kegiatan penilaian penting dilakukan, merupakan suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolok ukur atau kriteria yang telah ditetapkan yang dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan serta penyusunan saran-saran yang dapat dilakukan secara bertahap dalam pelaksanaan kegiatan (Gibson 2009). Namun kenyataannya pengurus belum pernah melakukan penilaian secara sistematis terhadap anggota, kegiatan penilaian hanya sekedar melihat laporan bulanan dari PMB, tidak ada jadwal dan standar untuk melakukan penilaian pada anggota dalam melaksanakan pemberian ASI eksklusif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembinaan pengurus IBI pada Praktik Mandiri Bidan kurang dilakukan. Agar program berjalan baik, pemantauan sendiri oleh pengurus terhadap pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan anggota sebaiknya dilakukan secara berkala dalam periode waktu tertentu (Azwar 2010). Pengurus IBI dalam hal ini sebagai pemimpin dalam pelaksanaan kegiatan pemberian ASI eksklusif harusnya mampu melakukan pembinaan pada PMB dengan baik, selain itu pengurus IBI juga harus memiliki

inisiatif untuk membuat sebuah inovasi bagaimana merancang kegiatan pembinaan yang baik sehingga tujuan dasar dari pelaksanaan PP No.33 untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif dapat tercapai.

2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Bidan Praktik Mandiri (BPM) tentang peran pengurus IBI sebagai pengelola dalam mengembangkan pelayanan kebidanan yang meningkatkan pelaksanaan Kebijakan PP No. 33 Tahun 2012 hampir seluruh informan mengatakan belum ada aturan pengembangan pelayanan secara langsung tentang aturan pemberian ASI Eksklusif, hal ini dapat dilihat dari pernyataan ini:

Informan Utama
Kotak 2 <i>“Kalau tugas bidan seharusnya mensukseskan program pemerintah meningkatkan cakupan ASI eksklusif” (informan A3)</i> <i>“Kalau peran pengurus IBI di ranting ado, la kalau ngasikan informasi waktu sedang ado acara arisan bulanan IBI tapi kadang-kadang pulo, tegantung dengan topiknyo tu la” (Informan A4)</i>

Berdasarkan kotak 2 diatas peran pengurus IBI sebagai pengelola dalam memberikan pelayanan kebidanan secara langsung pada BPM tentang PP No. 33 tahun 2012 belum semua PMB menerima informasi tentang PP No.33 tahun 2012 pemberian ASI Eksklusif. hal ini juga sejalan dengan hasil triangulasi pada ketua ranting yang menyatakan :

*“Kalau kami sebagai pengurus IBI ranting paling jago memberikan informasi kek bidannyo kalau sedang ado pertemuan rutin bulanan waktu sedang arisan tu la tapi kadang idak segalo bidan tu endak datang...”
(Informan B2)*

Sedangkan menurut informan B3 hasil wawancara pada kasi gizi mengatakan :

*“Sebenarnya untuk informasi tentang PP No.33 tahun 2012 untuk BPM seharusnya di bawah KIA karena bidan merupakan bagian dari KIA tapi kalau peran pengurus IBI rasanya belum pernah dilakukan, paling juga mengadakan seminar tentang ASI Eksklusif tapi bukan dari organisasi IBI yang mengadakan melainkan dari Dinas Kesehatan”
(Informan C3)*

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan organisasi IBI belum mempunyai peran yang sangat berarti terhadap pengembangan pelayanan kebidanan terutama tentang keberhasilan pemberian ASI Eksklusif.

Organisasi belum mampu memberikan pengarahan dan menjelaskan tugas-tugas anggota dalam melaksanakan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, mengembangkan kemampuan anggota hanya dengan memberikan seminar tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, belum mampu mensosialisasikan PP No.33 tahun 2012 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif kepada anggota secara langsung dan terjadwal, belum ada program kerja tentang aturan reward dan sanksi bagi anggota jika melanggar aturan dalam PP No. 33 tahun 2012.

Peran setiap pemimpin sebagai pengelola salah satunya melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan anggota yang ada di dalam organisasinya. Hal tersebut dapat dicapai dengan membina hubungan kerja yang baik, melalui prinsip kemitraan bukan prinsip atasan bawahan. Serta memberikan penghargaan kepada prestasi kerja mereka. Penghargaan tidak hanya berupa *financial* tapi dapat diberikan dalam bentuk pengakuan (Yukl 2005). Perlunya mendapat pengakuan adalah penting bagi seorang anggota organisasi yang akan berdampak pada munculnya motivasi kerja. Pengakuan merupakan alasan paling kuat bagi

seseorang untuk melakukan pekerjaan. Pimpinan yang mengenal bawahan adalah yang mampu menunjukkan perhatian atas bagaimana pekerjaan dilakukan oleh bawahan (Thoha, 2009).

3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Bidan Praktik Mandiri (BPM) yang dilakukan dengan cara *indept interview* hampir seluruh informan mengatakan masih kurang perencanaan, penyuluhan dan pengembangan sumber daya dari organisasi IBI dalam sosialisasi implementasi pemberian ASI eksklusif, seperti diungkapkan oleh responden :

Informan Utama
<p>Kotak</p> <p><i>“kalau peran pengurus IBI sebagai pembuat keputusan, pendidik dan penyuluh kesehatan belum nampak, paling jago kami dapat informasi ko dari seminar yang diadakan baik dari dinas maupun kerjasama dengan IBI” (informan A1)</i></p> <p><i>“Apo dak, rasonyo ado tapi masih kurang cuman ngomong-ngomong tu la” (Informan A4)</i></p> <p><i>“yang ado paling seminar dan harus bayar kalau endak jadi peserta..” (Informan A5)</i></p>

Hal ini sejalan dengan informasi yang diberikan oleh responden triangulasi bahwa masih kurang perencanaan secara tertulis dan terjadwal tentang sosialisasi PP No. 33 maupun sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran, seperti yang diungkapkan oleh responden :

“ Kalau dalam organisasi sudah ado tapi kurang perencanaan secara tertulis tentang sosialisasi yang ado maupun sanksi jika anggota melanggar aturan dalam PP No. 33 tahun 2012 tu, mungkin kedepan kito dari organisasi akan melihat lagi tentang aturan itu” (Responden B1)

“ Kalau selama ini belum ada peran dari organisasi IBI dalam melakukan negosiasi Implementasi Kebijakan PP RI No. 33 Tahun 2012, kebetulan kemaren kami baru membuat Perda di DPR tentang PP No.33 ini, belum ketuk palu Perdanya tapi insya allah januari sudah pengesahan. (Responden B3)”

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hampir seluruh responden mengetahui adanya Peraturan Pemerintah tentang ASI Eksklusif tapi hampir seluruh responden belum ada yang pernah membaca aturan tersebut secara lengkap terutama tentang PP No. 33 tahun 2012. Peran manajer sebagai pembawa dan pemberi informasi bagi

organisasi yang dipimpinnya meletakkan manajer sebagai salah satu pusat informasi dalam organisasi (Thoah, 2009; Dewi et al. 2016) Informasi berkaitan dengan komunikasi, manajer berkewajiban untuk menginformasikan kepada bawahan tentang tujuan yang akan dicapai dan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing anggota dalam organisasi. Informasi ini harus mampu dikomunikasikan dengan tepat oleh pimpinan sehingga akan muncul kejelasan tanggung jawab, target dan waktu yang harus dicapai oleh masing-masing anggota dalam organisasi (Thoah, 2009). Kondisi yang terjadi adalah pengurus tidak mengkomunikasikan secara baik mengenai tugas dan target pencapaian yang harus dikerjakan oleh anggota dalam melaksanakan peningkatan cakupan ASI Eksklusif. (Rini Pratiwi; Chriswardani S, 2008)

Sebagai dampak yang akan timbul dari keadaan ini adalah, anggota dalam organisasi tidak mendapatkan kejelasan informasi tentang tugas dan target yang harus mereka capai yang menjadi kewajiban mereka sebagai anggota sebuah organisasi. Padahal jelas bahwa seorang pemimpin dalam organisasi berkewajiban untuk

menjelaskan hal-hal yang menjadi tugas anggota (Winardi 2010; Putri 2014)

Sarana komunikasi pengurus dengan anggota dijalin melalui pertemuan arisan bulanan, dalam pertemuan tersebut digunakan oleh pengurus untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin dalam organisasi, mulai dari kegiatan memotivasi, evaluasi, pembinaan hingga pemberian informasi kepada anggota untuk meningkatkan pengetahuan anggota dalam menjalankan tugas manajemen laktasi. Menurut Muninjaya (2004) pemberian informasi dengan melakukan komunikasi pada seluruh staf dapat dilakukan melalui pertemuan rutin seperti rapat-rapat yang diadakan minimal sebulan sekali oleh pimpinan bersama seluruh staf. Tetapi hal tersebut belum cukup, harus ada kegiatan lain seperti supervisi kelapangan untuk memantau pelaksanaan program dan laporan evaluasi secara tertulis sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan (Gibson 2009; Ainita 2019)

Peran pengurus IBI dalam meningkatkan kemampuan anggota untuk meningkatkan cakupan ASI, seluruh informan menyatakan peningkatan pengetahuan anggota dilakukan

dengan menyelenggarakan seminar yang materinya terkait dengan ASI. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Wibowo, (2009) bahwa peningkatan kemampuan dilakukan oleh manajer sebagai bagian dari fungsi kepemimpinannya. Manajer memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja petugas dan cara yang dapat ditempuh adalah melalui pembelajaran atau pelatihan (Ainita 2019)

SIMPULAN

1. Peran kinerja pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai pelaksana yang meliputi memotivasi, mengevaluasi dan pembinaan kepada anggota dalam Implementasi Kebijakan PP RI No. 33 Tahun 2012 belum dilakukan dengan baik.
2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan organisasi IBI belum mempunyai peran yang sangat berarti terhadap pengembangan pelayanan kebidanan terutama tentang keberhasilan pemberian ASI Eksklusif. Masih kurang kerjasama secara regulasi dengan dinas kesehatan maupun instansi pemerintah yang terkait.
3. Peran kinerja pengurus IBI sebagai pembuat keputusan, pendidik serta penyuluh kesehatan tentang Implementasi

Kebijakan PP RI No. 33 Tahun 2012 masih perlu ditingkatkan

pemberian ASI Eksklusif yang sudah dibuat oleh pemerintah PP No. 33 tahun 2012.

Dapat disarankan hal-hal sebagai berikut

1. Bagi Organisasi IBI:

a. Meningkatkan motivasi, pembinaan dan pengawasan kepada bidan dalam melakukan praktik klinik kebidanan dalam usaha peningkatan cakupan ASI eksklusif.

b. Melakukan advokasi dengan Pemerintah Daerah untuk membuat aturan dan kerjasama dengan dinas kesehatan dan pemerintah kota dalam implementasi PP No. 33 tahun 2012

2. Bagi Dinas Kesehatan Kota

Diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan organisasi IBI karena organisasi IBI merupakan wadah bagi bidan dan membuat aturan tentang pemberian rekomendasi oleh IBI hanya kepada BPS yang mendukung program PPASI untuk membuat atau perpanjangan ijin praktek dalam Implementasi Kebijakan PP No. 33 tahun 2012

3. Bagi Praktik Mandiri Bidan (PMB)

Dapat meningkatkan pengetahuan dan panduan bidan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama tentang program peningkatan cakupan

DAFTAR RUJUKAN

Ainita, O., 2019. Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI untuk Mendukung Program ASI Eksklusif di Provinsi Lampung. *Ilmu Hukum Pranata Hukum*, 14(1), pp.80–88.

Anon, 2008. AD-ART Ikatan Bidan Indonesia Masa Bakti 2008-2013.

Azwar, A., 2010. *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Tangerang: Bina Rupa.

Dewi, R.S., Muhyi, R. & Rosida, L., 2016. Kajian Pelaksanaan Program Pemberian Asi Dan Peran Lintas Sektor Terkait. *Jurnal Berkala Kesehatan*, 1(2), pp.67–77.

Dharma, S., 2005. *Manajemen Kinerja, Falsafah Teori dan Penerapannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fikawati, S. & Syafiq, A., 2010. Kajian implementasi kebijakan ASI eksklusif dan IMD di Indonesia. *Makara Kesehatan*, 14(1), pp.17–24.

Gibson, 2009. *Organisasi: Perilaku-Struktur-Proses* Jilid Satu., Jakarta: Binarupa Aksara.

Helda, 2009. Kebijakan Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif. *KESMAS*, 3(5), pp.195–200.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018. *Profile Kesehatan Indonesia Tahun 2017*, Available at: website: <http://www.kemkes.go.id>.

Kusumaningrum, D.N., 2018. Rasionalitas Kebijakan Pro Laktasi Indonesia. *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), p.1.

Muninjaya, A. G., 2004. *Manajemen Kesehatan Edisi 2.*, Jakarta: EGC.

Putri, C.Y., 2014. Kajian analisis kebijakan pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif di Indonesia. , pp.561–565.

Rini Pratiwi, Chriswardani S, S.P.A., 2008. Analisis formulasi dan implementasi kebijakan inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif di Kabupaten. , (7), pp.1–17.

Roesli, 2005. *Mengenal ASI eksklusif Seri I*, Jakarta: PT. Pustaka Pemberdayaan Swadaya Nusantara.

Simarmata, B., 2016. Integritas. *Jurnal Ilmiah*, 2(1), pp.59–66.

Stephen P. Robbins, 2007. *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jakarta: Jakarta Prenhallin.

Thoha, 2006. *Perilaku Organisasi*, Jakarta.

Wibowo, 2009. *Manajemen Kinerja*, Jakarta.

Winardi, 2010. *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: Renika Cipta.

Yukl, G., 2005. *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta.